

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Gultom, E. (2020). *HUKUM PENGANGKUTAN LAUT*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (2nd ed.) Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, R. (2012). *HUKUM PENGANGKUTAN di INDONESIA*. Citra Mentari.
- Manaf, I., & Nadriana, L. (2023). *HUKUM PENGANGKUTAN* (1st ed.). Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI).
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). Mataram: MATARAM UNIVERSITY PRESS.
- Muhammad, A.K. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Adhitya Bakti.
- Nugroho, S.S., & Haq, H.S. (2019). *HUKUM PENGANGKUTAN INDONESIA Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Soedjono, W. (1982). *HUKUM PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN LAUT* (1st ed.). Jakarta: PT. BINA AKSARA.
- Tjakra Negara, S. (1995). *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang* (1st ed.) Jakarta: PT. Rineka Cipta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

C. LAIN-LAIN

Agus, S. W. (2021). *Analisis Hukum Penerbitan Konosemen Dalam Pengangkutan Barang Melalui Moda Angkutan Laut*, Universitas Bosowa.

Aspan, H. (2023). STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENEKAN WANPRESTASI DALAM PENGADAAN KAPAL. *Public Service And Governance Journal*, 4(1), 83-92. DOI: [10.56444/psgj.v4i1.809](https://doi.org/10.56444/psgj.v4i1.809)

Aljufri, M. R. (2020). Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut. *Lex Privatum*, 8(2).

Cintyara, M. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa. *Wajah Hukum*, 7(1), 66-72.

Daniella, M. D., Putra, W. T., & Widjaja, E. K. (2019). Asas Itikad Baik Dalam *Memorandum of Understanding* Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak. *Jurnal Notaire*, 2(2). 231-253. DOI: 10.20473/ntr.v2i2.13122

Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 89-102. DOI: 10.23920/jbmh.v5i1.50

Falonk. (2023). Diduga Lakukan Perambahan Hutan, PT Wisnu Mandiri Batara Dipolisikan. Diakses pada 08 September 2024 pukul 12.58 WIB, dari <https://www.amanahsultra.id/diduga-lakukan-perambahan-hutan-pt-wisnu-mandiri-batara-dipolisikan/>

Fresa Technologies. *Types of vessels Connecting Sea*. Diakses pada 29 Februari 2024 pukul 20.39 WIB, dari https://fresatechnologies.com/wp-content/uploads/2020/04/Type_of_vessels.pdf

Ginting, Y. P., Yovieta, A., Wendra, A. C., Oktyaning, C. A. P., Lusikooy, K. D., Adhitya, N. B., ... & Samosir, V. T. E. (2023). Sosialisasi

- Pembuktian Wanprestasi Kasus Utang Piutang. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1132-1147. DOI: [10.58812/jpws.v2i11.744](https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.744)
- Holili, H., Yunus, M., & Winarto, W. (2024). Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3718-3726. DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1140
- INDONESIA.GO.ID. (2024). Menyiapkan Tata Kelola Laut Berkelanjutan. Diakses pada 30 Januari 2024 pukul 10.58 WIB, dari <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7295/menyiapkan-tata-kelola-laut-berkelanjutan?lang=1>
- Kumaralo, I. S., & Risdalina, R. (2023). The Legal Force of the Cooperation Agreement Letter in a Cooperation Agreement is Reviewed According to Article 1320 of the Civil Code. *Journal of Social Research*, 2(3), 917-923. DOI: 10.55324/josr.v2i3.750
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Marasabessy, Z. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pelayaran Atas Wanprestasi Pencarter dalam Perjanjian Pengangkutan. *Mimbar Keadilan*, 16(1), 55-66. DOI: 10.30996/mk.v16i1.7797
- Massie, E. N. E. (2021). Tanggung jawab perusahaan ekspedisi muatan kapal laut atas kerusakan dan kehilangan barang dengan menggunakan transportasi laut. *Lex Privatum*, 9(3). 247-257.
- Medawati, M. (2019). Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Alat Bukti Fotokopi Akta Dalam Perkara Perceraian, UIN Antasari Banjarmasin
- Nasution, T.H. (2017). *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Studi Putusan MA No. 2014K/PDT/2011)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mirkas. (2023). Ampuh Sultra 'Warning' Ditjen Minerba dan KLHK Soal Kasus Dugaan Perambahan Hutan PT WMB. Diakses pada 08 September 2024 pukul 13.02 WIB, dari <https://kendari.pikiran-rakyat.com/sultra-kita/pr-2496314344/ampuh-sultra-warning-ditjen-minerba-dan-klhk-soal-kasus-dugaan-perambahan-hutan-pt-wmb?page=all>

- Permatasari, G. (2022). *PENYELENGGARAAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT (Studi Pada PT Samudera Indonesia Tbk Cabang Bandar Lampung)*, Universitas Lampung.
- Sari, D. P. (2019). Kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dalam perkara perdata. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 323-352. DOI: 10.22437/ujh.2.2.323-352
- Sianipar, W. H. (2021). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 405-414. DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1944
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2). DOI: 10.35968/jmm.v7i2.534
- Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P. (2023). Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Kehutanan). *UNES Law Review*, 5(4), 3763-3773. DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.692
- Sugiarto, E. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Rechtidee*, 11(2), 182-199. DOI: 10.21107/ri.v11i2.2171
- SultraTimes. (2023). Terkait Dugaan Perambahan Hutan di Konut, Ampuh Sultra Laporkan PT WMB ke KLHK RI dan Mabes Polri. Diakses pada 08 September 2024 pukul 13.00 WIB, dari <https://sultratimes.com/2023/02/03/terkait-dugaan-perambahan-hutan-di-konut-ampuh-sultra-laporkan-pt-wmb-ke-klhk-ri-dan-mabes-polri/>
- Tarigan, M. I., Runtung, R., Ginting, B., & Harianto, D. (2014). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia. *USU Law Journal*, 4(1), 127-138.
- Wahidah, Z. (2020). Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Tahkim*, 3(2), 21-37. DOI: 10.29313/tahkim.v3i2.6435

Wawancara dengan Ibu Mardika S.H. selaku Kuasa Hukum dari PT. Andatu Sukses Abadi, pada Sabtu 24 Agustus 2024 pada pukul 14.54 WIB di Kantor Hukum “Wijayanto Setiawan & Partners” Surabaya.

Wawancara dengan Bapak Dr. Nur Kholis S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 09.43 WIB di Pengadilan Negeri Surabaya

Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(5), 645-656. DOI: 10.32672/jsa.v7i5.1522